

ARTIKEL TESIS

SINKRONISASI PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DAN IMPLEMENTASINYA DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN  
BATUBARA(STUDI KASUS DI PT. INDOMINCO MANDIRI BONTANG)



Disusun oleh :

VALENTINUS RAMON BUGA

NPM : 11.5201599  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
2015

**SINKRONISASI PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN IMPLEMENTASINYA DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA(STUDI KASUS DI PT. INDOMINCO MANDIRI BONTANG)**

**INTISARI**

Perkembangan dan pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat wajib, menjadikan CSR sebagai tuntutan yang tidak bisa terelakan lagi. Kesadaran dari korporat, yang mulai memposisikan masyarakat sebagai bagian dari *stakeholders* yang turut andil dalam merepresentasikan kehadiran perusahaan di tengah masyarakat dan bukan hanya mengejar keuntungan bisnis semata memberikan efek positif dalam implementasi CSR. Sehingga diperlukan suatu sinkronisasi pengaturan tentang CSR yang menjadi suatu landasan hukum pelaksanaan CSR.

Berdasarkan sinkronisasi pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT. Indominco Mandiri Bontang selaku perusahaan pertambangan batubara berusaha mengimplementasikannya kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang sebagai bagian dalam rencana bisnis perusahaan yang harus dipatuhi. Komitmen pelaksanaan CSR oleh PT. Indominco memang selayaknya harus dilakukan oleh setiap perusahaan dan memberikan manfaat positif maupun negatif yang dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran sinkronisasi pengaturan CSR, sebagai dasar yang dapat dipakai oleh PT. Indominco Mandiri Bontang dalam mengimplementasikannya di sekitar wilayah tambang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri Bontang telah sesuai dengan aturan hukum tentang CSR dan memberikan dampak positif maupun negatif kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang.

**Kata-kata kunci : CSR, Sinkronisasi Pengaturan, PT. Indominco Mandiri Bontang**

**ARRANGEMENT SINCHRONIZE *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* AND ITS IMPLEMENTATION IN COAL MINING  
(CASE STUDY IN PT. INDOMINCO MANDIRI BONTANG)**

**ABSTRACT**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) development and arrangement which were essentially obligatory caused CSR as an unavoidable insistence. The corporate responsibility which placed society as a part of *stakeholders* whom took part in representing the presence of the company and did not only get the business profit in implementing CSR. So, it was needed a arrangement synchronize about CSR that could be a law base in running CSR.

Based on arrangement synchronize *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT. Indominco Mandiri Bontang as a coal mining tried to implement it to society around the mining in company business plan that must be done by every company and gave positive or negative impact felt by people.

The objection of this research was to figure out the picture of CSR arrangement synchronize as a base that could be used by PT. Indominco Mandiri Bontang in implementing it around the mining.

Based on the result of research is that CSR implementation which was done by PT. Indominco Mandiri Bontang was same as standard regulation about CSR and had positive and negative impact to society around the mining.

**Key words : CSR, arrangement synchronize, PT. Indominco Mandiri Bontang**

## A. Latar Belakang Masalah

Awal pemikiran tentang tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan pemikiran dari Andrew Carnegie, seorang konglomerat pendiri perusahaan *U.S. Steel* di Amerika Serikat, yang pada tahun 1889 menerbitkan buku berjudul *The Gospel Of Wealth* (Poerwanto, 2010, hal. 17). Secara garis besar buku tersebut mengemukakan pernyataan klasik mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemikiran *Carnegie* didasarkan pada dua prinsip yakni prinsip amal dan prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat paternalistik dalam pengertian memandang para pemilik bisnis memiliki peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.

Pada prinsipnya *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan yang berawal dari kesadaran perusahaan dan bersifat sukarela. Cikal bakal *Corporate Social Responsibility* bermula dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya dorongan eksternal tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungannya, maka kegiatan *philantropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya (A. B. Susanto, 2007, hal. 8). Pada awalnya dunia bisnis menganggap bahwa perusahaan hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun dalam perkembangannya perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan *profit* (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya (Yusuf Wibisono, 2007, hal. 24).

Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer

terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Dalam karyanya John Elkington mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas *the World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Brundtland Report (1987). Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus : 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) ([www.aniunpad.files.wordpress.com](http://www.aniunpad.files.wordpress.com), diakses tanggal 21 Maret 2013).

Hingga dekade 1990-an, menurut Mas Achmad Daniri (*standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan*-[www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com), diakses tanggal 02 April 2013) bahwa wacana *Corporate Social Responsibility* (CSR) terus berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya KTT (*United Nations Conference on Environment and Development*) tentang Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tidak hanya oleh negara, tetapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan *Built to Last; Successful Habits of Visionary Companies* di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Gagasan tersebut kemudian didukung oleh Mynard Jr dan Susan E. Mehrtens (Mukti Fajar ND, 2010, hal. 11) yang menawarkan paradigma baru tujuan perusahaan dalam gelombang keempat (*Fourth Wave*) dari paradigma *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*)

yang direfleksikan hanya dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja ke arah paradigma baru yakni konsep *Triple Bottom Line*, bahwa korporasi bertujuan bukan hanya mencari keuntungan (*profit*), tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial (*people*) dan melestarikan lingkungan hidup (*planet*).

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif (Yusuf Wibisono, 2007). *Pertama*, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

*Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

*Ketiga*, kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Sesungguhnya di Indonesia, konsep *Corporate Social Responsibility* secara filosofis sudah tertanam dalam jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini identik dengan sila kelima Pancasila (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, hal. 215).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisi ketentuan bahwa : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Ini berarti bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi nusantara harus bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat dalam dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara implisit bunyi Pasal 1 angka 3 dapat ditafsirkan bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk *philanthropy* atau kedermawanan perusahaan dan komitmen perusahaan dalam memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga kecenderungan menerapkan *Corporate Social Responsibility* secara sukarela serta pelaksanaannya lebih bersifat *moral obligation*.

Sementara itu, dengan diaturnya *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 74 Undang-Undang PT, menimbulkan ketidakkonsistenan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan konsep dasar terhadap tanggung jawab sosial sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang semula bersifat “*social responsibility(moral obligation)*”, menjadi kewajiban hukum atau “*legal obligation*” dan disertai dengan pengenaan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya seperti tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selain itu, terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam memberikan pemahaman tentang *Corporate Social Responsibility*, dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, istilah yang digunakan adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, istilah yang digunakan adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan junto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, istilah yang digunakan adalah program kemitraan dan program bina lingkungan. Perbedaan istilah tersebut mengakibatkan multi tafsir, sehingga berakibat pada kemandirian perusahaan dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* di lapangan.

Di Indonesia kegiatan *Corporate Social Responsibility* berkembang secara positif seiring dengan perkembangan demokrasi, masyarakat yang semakin kritis, globalisasi dan era pasar bebas. Namun diakui baru sebagian kecil perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana hasil survey yang dilakukan Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,25% perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, 209 atau 55,75% menyatakan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), sumbangan kepada lembaga agama (50 perusahaan), sumbangan kepada lembaga sosial (39 perusahaan), dan



pengembangan komunitas (4 perusahaan). Hasil survei juga menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan sangat bergantung pada keinginan pihak manajemen (Dalam Sukarmi, Tanggung Jawab Social Perusahaan (*Corporeate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia, (<http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 22 Maret 2013).

Munculnya beberapa kasus dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya, khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (ekstraktif). Sebagai contoh, PT. Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi (Yusuf Wibisono, 2007). Kasus Pencemaran Teluk Buyat, yaitu pembuangan tailing ke dasar laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga berkurangnya tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal akibat operasional PT Newmont Minahasa Raya (NMR) tidak hanya menjadi masalah nasional melainkan internasional (Leimona dalam Fauzi, 2008). Begitupula konflik hingga tindak kekerasan terjadi akibat pencemaran lingkungan dan masalah sosial terkait operasional PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) di wilayah Duri Provinsi Riau, dimana masyarakat menuntut kompensasi hingga tingkat DPR pusat terkait dampak negatif operasional perusahaan tersebut terhadap kondisi ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang semakin memburuk (Mulyadi, 2003).

Berdasarkan beberapa kasus di atas, masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak boleh

dianggap marginal, atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*, merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.

Kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tersebut bukan semata-mata memenuhi peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal junto Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas melainkan secara logis terdapat hukum sebab akibat, yang mana ketika operasional perusahaan memberikan dampak yang merugikan, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan.

Pada umumnya, perusahaan menciptakan suatu program dengan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat sehingga program tersebut diharapkan dapat berdampak baik bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan pelaksanaan konsep *bottom up*, yang kemudian mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ditelaah perusahaan untuk membentuk program CSRnya. Dari berbagai model *Corporate Social Responsibility* yang ada, perusahaan kemudian mengimplementasikan model tersebut ke dalam bentuk program CSR.

Salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* yang sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama yang bergerak di bidang perminyakan, pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya adalah program *community development*(*ComDev*).

Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan. Cara ini juga dapat membangun citra

sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan, selain itu akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat, rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat (A.B. Susanto, 1997).

Selain implementasinya yang belum sepenuhnya memenuhi aturan-aturan tersebut, program-program pengembangan masyarakat atau *community development*, belum menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Secara umum program tersebut belum memberdayakan masyarakat sehingga mereka tidak siap menghadapi masa pasca penambangan. Ini artinya bahwa perusahaan belum mampu merealisasi program *community development* dengan baik karena muara dari program *community development* adalah pemberdayaan masyarakat (Ife, 2006).

Pada taraf tertentu, kondisi seperti ini menimbulkan penolakan-penolakan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap keberadaan perusahaan di suatu wilayah dan terhadap kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Penolakan-penolakan tersebut dapat dilihat dari kegiatan demonstrasi menentang pemberian izin kepada perusahaan yang akan melakukan pertambangan, sikap untuk tidak terlibat kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility*, atau bahkan menjurus sampai kepada tindakan aksi penembakan yang mengganggu di sekitar kawasan tambang seperti yang terjadi akhir-akhir ini([www.kabar24.com](http://www.kabar24.com), Teror Penembakan di Freeport: Muncul Selebaran Komando Militer Teny Kwalik, diakses tanggal 14 Desember 2013). Sikap menolak seperti itu merupakan faktor penghambat terciptanya program yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengajukan tesis dengan judul **“Sinkronisasi Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dan Implementasinya di Perusahaan Pertambangan Batubara(Studi Kasus di PT. Indominco Mandiri Bontang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi peraturan hukum terkait *corporate social responsibility* di sektor pertambangan ?
2. Bagaimana implementasi *corporate social responsibility* di perusahaan pertambangan batubara (studi kasus di PT Indominco Mandiri Bontang) ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dengan cara melakukan pendekatan masalah yang diteliti, sebagai sumber utama adalah melakukan wawancara dengan narasumber (Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, hal. 4). Penelitian dilakukan secara langsung di PT. Indominco Mandiri Bontang, Kalimantan Timur dengan tujuan untuk mencari data dan informasi terkait dengan obyek penelitian penulis. Selain penelitian empiris, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang terkait seperti, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan obyek penulisan dan kamus yang berkaitan dengan obyek penulisan hukum.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan politik hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memberikan gambaran tentang interaksi masyarakat sosial, beserta seluruh gejala-gejala sosial, dan kondisi-kondisi sosialnya yang diperlukan sebagai upaya perwujudan hukum yang efisien. Dalam hal ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan oleh penulis dengan memahami implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan interaksi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar kawasan beroperasinya suatu perusahaan. Sedangkan pendekatan politik hukum dijadikan penulis dalam melakukan eksplanasi dan eksplorasi hukum untuk mengkaji dan mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai *ius constitutum*, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan dengan melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun *ius constituendum*.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian (Bambang Sunggono, 2006, hal. 125). Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti dalam dokumen dan publikasi (Bambang Sunggono, 2006, hal. 126). Data sekunder merupakan data yang tersedia dan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Responden yang digunakan penulis dalam mendukung penelitian ini yaitu : Head Community Relationship Departemen PT. Indominco Mandiri Bontang, Kalimantan Timur, Kepala Desa Suka Damai, Kepala Desa Santan Hulu, Lurah Bontang Lestari yang termasuk dalam wilayah Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Indominco Mandiri Bontang, Kalimantan Timur, dan Kepala Kantor BAPPEDA selaku ketua koordinator Forum CSR kota Bontang.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Sinkronisasi Peraturan Hukum terkait *Corporate Social Responsibility***

Implementasi *Corporate Social Responsibility*(CSR) yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan, dan profit, risiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang telah melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar yang merupakan titik awal yang sangat baik menuju pendekatan CSR yang lebih luas. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas CSR perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan inti, strategi, aktivitas, dan proses manajemen perusahaan(A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategi Management dalam CSR*, Jakarta, Esensi divisi Penerbit Erlangga, 2009, hal.48).

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Di samping itu, setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan pendekatan CSR(*ibid*)

Meskipun tidak terdapat standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan aktivitas CSR, namun kerangka kerja (*framework*) yang luas dalam pengimplementasian CSR masih dapat dirumuskan, yang didasarkan pada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang-bidang seperti manajemen lingkungan. Kerangka kerja ini mengikuti model “*plan, do, check, and improve*”

dan bersifat *fleksibel*, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan.

Selain itu, sekalipun istilah CSR dalam berbagai peraturan disebutkan dengan pengertian yang berbeda, seperti misalnya dalam Undang-Undang tentang BUMN menyebutkan dengan istilah program kemitraan dan program bina lingkungan, Undang-Undang tentang Penanaman Modal menyebutkan dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan batubara menyebutkannya dengan istilah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan dengan istilah Pemenuhan Hak atas Lingkungan dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menyebutkan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas, namun demikian apapun istilahnya, CSR ditetapkan sebagai kewajiban perusahaan. Dalam hal ini, berbagai peraturan tersebut di atas tidak saling bertentangan dalam menetapkan CSR sebagai kewajiban perusahaan.

Berbagai istilah yang digunakan dalam berbagai peraturan tersebut di atas tidak mempunyai perbedaan secara esensial, melainkan hanya perbedaan redaksional. Sebagai contoh, istilah program kemitraan dan program bina lingkungan dalam Undang-Undang tentang BUMN diorientasikan untuk memberdayakan masyarakat sekitar, yang pada prinsipnya, hal ini sejalan dengan makna dari CSR. Demikian juga, istilah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Minerba, pada prinsipnya juga sama dengan makna CSR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal ataupun Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan kepada setiap perusahaan pertambangan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,

karena bergerak di bidang sumber daya alam, sementara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dinyatakan tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Adjat Sudradjat “Pentingnya CSR Pertambangan”, <http://www.bataviase.co.id/>, diakses tanggal 13 Januari 2015).

Ketentuan bahwa CSR merupakan kewajiban perusahaan, bukan sekedar komitmen moral, juga ditegaskan dalam putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945, tanggal 15 April 2009. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara dengan menguasai atas bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh diabaikan. Berdasar putusan MK tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan, sebagai salah satu pemangku kepentingan, mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan yang baik dan berkelanjutan, yang pada esensinya juga merupakan CSR. (Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945*. Tanggal 15 April 2009.” Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian Pasal 74 UUPt”, hal 90).

Berdasarkan berbagai keberagaman pengaturan CSR tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa:



- a. Berbagai macam istilah yang digunakan dalam beberapa peraturan terkait CSR secara substansial tidak mempunyai perbedaan, kecuali sekedar perbedaan redaksional.
- b. Berbagai istilah yang digunakan dalam beberapa peraturan mempunyai unsur esensial yang sama, yaitu:
  - 1) CSR merupakan kewajiban regulasi;
  - 2) Perusahaan yang wajib CSR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam;
  - 3) adanya biaya yang dibebankan kepada perusahaan yang melaksanakan CSR; dan
  - 4) adanya sanksi atau penghargaan yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan ataupun tidak melakukan CSR.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat keberagaman istilah atau rumusan yang digunakan untuk menyebut CSR dalam beberapa peraturan, namun memiliki kesesuaian secara substansial.

## **2. Implementasi *Corporate Social Responsibility* Oleh PT. Indominco Mandiri Bontang**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, CSR yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. **Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bidang Sosial**
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan
    - a). Pendidikan Keaksaraan
    - b). Tunjangan Guru Honorer dan Guru Berprestasi
    - c). Penyaluran Beasiswa
    - d). Penunjang Sarana Pendidikan
    - e). Pendidikan Non formal
    - f). Training dan Pendidikan Guru SD/MI

- g). *Minning Goes to Schools*
- h). Pengadaan Taman Kanak-kanak
- i). Pelatihan Mekanik Alat Berat
- j). Pelatihan Mekanik Motor Injeksi

2) Program Kesehatan

- a) Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- b) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- c) Kampanye Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- d) Program Perbaikan Gizi Balita
- e) Pelaksanaan Khitanan (*Circumcision*) Massal
- f) Program Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan
- g) Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis
- h) Bantuan Mobil Ambulance

3) Program Kepemudaan, Olah Raga dan Seni

- a) Program *Green School&Adhiwiyata*
- b) Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
- c) Pembinaan Olah Raga dan Seni Budaya

**b. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bidang Ekonomi**

1) Kewirausahaan

- a). Pelatihan Motivasi KewirausahaanMuda
- b). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2) Pembinaan *Home Industry*

- a). Pengolahan Rumput Laut
- b). Pengolahan IkanTeri Borneo
- c). Dodol Buah
- d). Keripik dan Minuman Ringan
- e). Kerajinan Tangan

3) Pembinaan Agribisnis

- a). Perkebunan Kelapa Sawit
- b). Budidaya Rumput Laut

- c). Budidaya Semangka
- d). Budidaya Tanaman Karet
- e). Penanaman Padi Bibit unggul
- f). Pengembangan Ternak Terpadu
- g). Budidaya Ikan Lele

**c. Implementasi *Corporate Social Responsibility*(CSR) Bidang Lingkungan**

- 1) Pelestarian Alam
  - a). Pelestarian Tanah(Penghijauan)
  - b). Pelestarian Hutan dan udara
  - c). Pelestarian laut dan pantai(Penanaman Mangrove)
  - d). Pelestarian flora (Pembibitan)
- 2) Penyehatan Lingkungan
  - a). Reklamasi Lingkungan
  - b). Lomba Desa Sehat
  - c). Pengolahan Sampah Rumah Tangga

**d. Implementasi *Corporate Social Responsibility*(CSR) Bidang Infrastruktur**

- 1) Infrastruktur Pendidikan
- 2) Infrastruktur Jalan
- 3) Infrastruktur Perkantoran
- 4) Infrastruktur Irigasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Program-program CSR yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar wilayah

tambang memberikan efek positif terhadap nama PT. Indominco Mandiri baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

- c. Ada perubahan dalam budaya masyarakat dengan beroperasinya PT. Indominco Mandiri. Dengan beroperasinya PT. Indominco Mandiri, terdapat penilaian masyarakat yang sangat tinggi terhadap profesi pegawai perusahaan, dan masyarakat sekitar kawasan tambang kurang percaya diri dengan profesi yang mereka geluti, seperti misalnya petani karet atau petani sawit. Masyarakat merasa bahwa menjadi seorang pekerja perusahaan dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dan memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan kalau menjadi petani.
- d. Fungsi kepala desa atau lurah berkembang menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi warga dan sebaliknya sebagai tempat bagi perusahaan untuk mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sangat terasa.
- e. Adanya kerjasama yang baik antara pihak perusahaan dan pemerintah telah menyebabkan program penyejahteraan masyarakat dapat dipadukan dan saling melengkapi.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keberagaman pengaturan *Corporate Social Responsibility* secara substansial tidak mempunyai perbedaan, kecuali perbedaan redaksional. Unsur substansial dalam keberagaman pengaturan CSR meliputi: CSR sebagai kewajiban regulasi, CSR diwajibkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam, adanya biaya yang dibebankan kepada perusahaan yang melaksanakan CSR, dan

adanya sanksi atau penghargaan yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan CSR.

- b. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indominco Mandiri sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang CSR. Implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri berdampak positif maupun negatif terhadap perubahan budaya masyarakat. Dampak positifnya berupa kesadaran masyarakat terkait kesehatan, akses ekonomi lebih terbuka, masyarakat menjadi lebih melek huruf, sedangkan dampak negatifnya adalah bahwa bantuan perusahaan sebagai salah satu bentuk CSR tidak mengarah kepada pemberdayaan masyarakat serta berkurangnya penghargaan terhadap profesi mereka sebagai petani, dan beranggapan bahwa profesi pekerja perusahaan lebih tinggi.

## **2. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan perlu melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap program *Corporate Social Responsibility* supaya mengarah kepada pemberdayaan masyarakat.
- b. Forum *Corporate Social Responsibility* di wilayah kota Bontang perlu dioptimalkan dalam mengharmonisasikan antara kebutuhan masyarakat petani dengan program CSR perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- A. B. Susanto, 2007, *Corporate Social Responsibility: A Strategic Management Approach*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- ....., 2009, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategi Management dalam CSR*, Esensi divisi Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ali Zainudin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Baharuddin Salam, 1997, *Etika moral, asas moral, dalam kehidupan sosial Manusia*, Renika cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji, dkk., 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional 2001, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dirjosiswono Soejono, 1999, *“Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia”*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- H. Noorachmad Hadi, MA, Cetakan I, 2010, *“Corporate Social Responsibility: Antara Opportunity atau Pengorbanan Sumber daya Bagi Perusahaan”*, Penerbit PT. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Elkington, J & Tropman, 1997, *“Canibals With Forks : The Tripple Bottom Line of 21<sup>st</sup> Century Business”*, Thompson London, Cetakan Bahasa Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fajar, Mukti ND, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Studi tentang penerapan ketentuan CSR pada perusahaan Multinasional*,

- Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Freeman, R. Edward., 1989, 'A Stakeholder Theory of the Modern Corporation', dalam L.B.Pincus (ed), *Perspectives in Business Ethics*, McGraw Hill, Singapore.
- Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.
- ....., *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, 2008, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermien Roosita, makalah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri, 2005.
- Isa Wahyudi, Busyra Azheri, Cetakan I Juni, 2008, "*Corporate Social Responsibility: Prinsip Pengaturan dan Implementasi*", Penerbit Setara Press, Malang
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Cetakan Pertama, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- John M. Echols & Hasan Shadily, 1990, "*Kamus Besar Bahasa Inggris*", Gramedia, Jakarta.
- Kotler, Philip and Lee, Nancy., 2005, "*Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*", John Wiley and Sons, Inc., New Jersey (dalam buku : Mukti Fajar Supriatna). Edisi Khusus Terjemahan Bahasa Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian Pasal 74 UUPt", *Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*

*tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009.”*

Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility, menjinakkan gejolak sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Yogyakarta.

Salim HS., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, Cetakan 6, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto Soerjono, 1989, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudrajat, Nandang, 2010, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Swasono, 2005, *Indonesia an Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Perkumpulan PraKarsa, Jakarta.

Tambunan, T. 2006, *The Performance of Small Enterprises during economic Crisis: Evidence Indonesia*. Journal of Small Business Management. Milwaukee.

Thompson & Strickland (dalam buku Jones Thomas), 2001, “*Korelasi Positif Antara Peran Perusahaan Dalam Merealisasikan Tanggung Jawab Sosial*”, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Todaro, MP., dan Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.

Yunianto, Bambang dkk., 2004, *Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas, dalam penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*”, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara, Bandung.

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fasco Publishing, Gresik.



### ***Peraturan Perundang-undangan***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5305)

### ***Website***

[www.aniunpad.files.wordpress.com](http://www.aniunpad.files.wordpress.com)

<http://www.bataviase.co.id/>

<http://www.bismar.wordpress.com/>

<http://www.create.or.id/>

[www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com)

<http://www.diskopjatim.go.id/>

<http://www.info-csr.blogspot.com/>

<http://www.lawskripsi.com/>

<http://www.legalitas.org>

[www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)

<http://www.megawati-institute.org//>

### ***Koran***

Kalimantan Post, 12 September 2010